

BAB III

PERTARUNGAN NORMA GLOBAL DAN NORMA DOMESTIK ANALISIS *REGIME OF TRUTH*

Kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok tahun 2017 silam merupakan bukti betapa ternyata tidak mudah gagasan global masuk ke Indonesia, terutama pada perkara kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu pokok dalam demokrasi yang berasal dari negara-negara Barat benar-benar membebaskan siapa saja mengemukakan pendapat termasuk berpendapat tentang agama di luar apa yang ia percaya. Di negara-negara Barat yang terbiasa memisahkan urusan agama dengan sosial-politik menyebabkan apa yang dilakukan Ahok bukan termasuk sebuah pelecehan atau penghinaan, hanya seseorang yang sedang mengungkapkan pendapatnya. Masyarakat yang setuju dengan anggapan ini menyalahkan dan menuduh masyarakat serta pemerintah Indonesia bahwa telah melukai asas demokrasi. Oleh karena itu mereka meminta Ahok untuk dilepaskan jika memang Indonesia negara demokrasi.

Sayangnya hal ini tidak berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya masih memegang hukum adat, tidak bisa melepaskan Ahok begitu saja. Dalam masyarakat yang menerapkan hukum adat ada hukum-hukum atau norma tertentu yang dijalankan dan berasal dari sumber-sumber yang berbeda seperti agama, hukum kerajaan atau pemerintahan terdahulu yang pernah berkuasa, atau asimilasi budaya negara lain melalui relasi-relasi yang dibangun. Indonesia dengan wilayah yang luas dan masyarakat yang heterogen menjadikan negara ini terbagi menjadi beberapa wilayah dengan hukum adat yang berbeda. Khususnya di tanah Jawa dimana kasus Ahok terjadi, hukum adat yang di pegang bersumber dari agama Islam sangat kuat. Selain karena pusat pemerintahan, ini yang menjadikan reaksi penolakan terhadap wacana global begitu kuat di wilayah ini.

Dua bentuk tawaran penyelesaian masalah Ahok baik dari masyarakat global maupun lokal merupakan cara-cara masing-masing aktor untuk membentuk rezim kebenarannya. Rezim kebenaran yang digagas oleh Michel Foucault menjadi alat untuk menganalisis perdebatan tersebut. Rezim kebenaran mampu menjelaskan bagaimana penguasaan pikiran dengan suatu wacana mampu mengubah seseorang, kelompok, hingga negara. Rezim kebenaran dihasilkan dari kecintaan Foucault terhadap sejarah, filsafat, dan psikopatologi¹². Sehingga rezim kebenaran erat kaitannya dengan abnormalitas suatu keputusan terutama pada keyakinan dan pikiran (Afandi, 2012).

Albert Wirya menggunakan rezim kebenaran untuk menganalisa kasus diskursus pendisiplinan pasung pada orang yang terkena penyakit gila. Pada tulisannya *Rezim Kebenaran Rasionalisme dalam Diskursus Kegilaan dan Tindakan Pendisiplinan Pasung sebagai Kejahatan* dijelaskan bagaimana daerah tertentu masih menggunakan pemasungan pada orang yang gila meskipun pemasungan merupakan tindakan yang menghalangi seseorang untuk berkembang dan ini melanggar hak asasi orang tersebut. Secara ilmiah telah dijelaskan dan telah diberikan jalan keluar untuk masalah tersebut namun diskursus tentang kegilaan dan metode pemasungan tetap digunakan (Wirya, 2013). Sama dengan contoh kasus tersebut, pada kasus Ahok lagi-lagi perdebatan kedua gagasan kembali terjadi. Pada kasus ini diskursus agama yang dibawa oleh konservatis lokal Indonesia melawan wacana kebebasan berpendapat yang berasal dari global.

A. Paradoks Nilai-Nilai Global di Indonesia

Gagasan-gagasan kanan/ konservatif dikatakan muncul sebagai reaksi terhadap laju perubahan politik,

¹² merupakan cabang dari Ilmu Jiwa yang menjadikan gejala kejiwaan sebagai obyek materialnya.

sosial dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam banyak hal terutama setelah terjadinya Revolusi Prancis. Pada abad kesembilan belas pertumbuhan liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme, di negara-negara Barat sangat baik. Sementara ideologi-ideologi tersebut mendukung mengenai revolusi, konservatisme muncul untuk “membela” tatanan sosial tradisional yang semakin “diperangi”. Karakter konservatisme digambarkan sebagai filsafat negatif, dimana tujuannya hanya untuk mengajarkan perlawanan, atau “menaruh kecurigaan” yang besar terhadap suatu perubahan. Perlu diketahui bahwa jika konservatisme sekedar mempertahankan *status quo*, maka konservatisme hanya menjadi sikap politik, bukan suatu ideologi. Banyak orang atau kelompok dapat dianggap “konservatif” dalam arti mereka menolak perubahan, tetapi tentu saja tidak dapat dikatakan meyakini nilai-nilai politik konservatif. Prinsip utama dari gagasan konservatisme adalah meliputi tradisi, ketidaksempurnaan manusia, solidaritas organik, hierarki, otoritas, dan hak milik. Pada praktiknya kaum konservatif berusaha untuk melestarikan berbagai lembaga seperti monarki, agama, pemerintahan parlementer, dan hak-hak properti, dengan tujuan menekankan stabilitas dan kontinuitas sosial. Versi lebih ekstremnya adalah menentang modernisme untuk kembali ke “hal semula/ apa adanya” (Heywood, 2007). Konservatisme dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya konservatisme paternalistik, konservatisme otoriter, konservatisme libertarian, konservatisme agama/kepercayaan, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai konservatisme agama/kepercayaan. Konservatisme jenis ini memiliki landasan yang diambil dari kepercayaan atau agama tertentu. Konservatisme agama ini prinsipnya adalah menerapkan ajaran agama-agama tertentu tersebut ke

dalam kehidupan perpolitikan. Pada praktiknya tidak jarang hanya menyatakan nilai dari ajaran-ajaran agama tersebut namun ada masanya untuk memengaruhi hukum yang berlaku (Andersen & Taylor, 2008).

Perkembangan konservatisme baik partai politik dan kelompok masyarakat tidak hanya ada di Eropa maupun Amerika, namun hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia khususnya perkembangan gerakan ada sejak masa sebelum kemerdekaan, dan partai politiknya ada setelah kemerdekaan. Perkembangan konservatis agama baik partai politik maupun kelompok sempat menurun pada masa Presiden Soeharto. Setelah rezim Soeharto berakhir kebebasan pendukung konservatis mulai bisa bernafas lega dan berkembang lagi sampai pada masa reformasi ini. Pada era reformasi kelompok dan partai konservatis lebih leluasa dalam bergerak dan menyampaikan gagasan mereka baik dalam isu sosial sampai pada isu politik. Oleh karena itu kasus pelecehan agama yang dilakukan petinggi pemerintah Indonesia tidak luput dari “kejaran” kelompok konservatis agama.

Bentuk penyebaran diskursus yang dilakukan oleh konservatis di Indonesia tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh kaum globalis. Gagasan-gagasan konservatis menyebar melalui gerakan-gerakan mereka bentuk. Baik pemimpinnya hingga anggota semua turut andil dalam penyebaran gagasan yang mereka percaya. Buktinya, sebagai salah satu gerakan konservatis di Indonesia, pada tahun 2008 Sekretaris Jenderal FPI Shabri Lubis memberikan pidato di pertemuan umum yang dilaksanakan di Banjar, Jawa Barat. Dalam pidatonya, ia menyebutkan dengan lantang, *“Bunuh pengikut Ahmadiyah. Hapuskan pengikut Ahmadiyah. Masa bodoh dengan HAM. Kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung*

jawab. Bilang saya yang tanggung jawab.” (DetikNews Staff, 2008).

Beberapa bukti lain diskursus konservatis yang diwakili oleh FPI adalah pada tahun 2012 mereka memiliki spanduk-spanduk yang berada di dekat kantor pusat FPI Jakarta. Mereka meletakkan spanduk besar di ruang publik dimana dapat dilihat banyak orang. Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan bagaimana FPI memandang liberalisme yang kebanyakan diambil langsung dari buku Rizieq Shihab. Selain itu juga di spanduk lainnya secara terang-terangan menentang liberalisme dan pendukungnya. Mereka berargumen bahwa liberalisme merupakan ancaman paling berbahaya untuk Islam di Indonesia (Woodward, et al., 2014). Kemudian pada tahun 2017 ketika pertemuan kenegaraan antara Indonesia dan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong yang membahas mengenai kerjasama di berbagai bidang antar kedua negara. Beberapa hari sebelum pertemuan itu dilaksanakan Rizieq Shihab memberikan pidato dalam acara Milad FPI ke-19. Dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa masyarakat dan pemerintah untuk tidak melakukan kerja sama dalam kebatilan (Syakur, 2017).

Pidato ini mengisyaratkan penolakan terhadap pertemuan kedua negara yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan FPI anti terhadap segala hal mengenai komunisme dan liberalisme. Dalam pidatonya, Rizieq mengutip surat Al-Maidah ayat 2. Selain itu ia juga mengatakan, *“Ingat, diakui atau tidak diakui, saat ini FPI telah menjadi ikon amar makruf nahi mungkar. Ini adalah karunia Allah Subhanahu Wata’ala yang wajib disyukuri,”* (Syakur, 2017). Pada tahun yang sama, Shabri Lubis juga menyinggung mengenai ABI yang sempat mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Dalam orasinya di Tabligh Akbar Garut ia mengatakan bahwa Allah telah

memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk membangun *ukhuwah* (baca: persaudaraan) Islamiyah dan persatuannya (Muhtadin, 2017). Pidatonya ini mengandung makna bahwa gerakan FPI akan selalu mendapat dukungan dari Tuhan, kekuatan diatas manusia. Ini membuat orang-orang percaya dan kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh FPI yang kemudian menarik lebih banyak lagi masa untuk bergabung dengan FPI.

Selain melalui pidato-orasi, FPI juga tidak sedikit mengeluarkan buku. *Hitam Putih FPI: Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, kemudian *PKI: Apa dan Bagaimana, Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, dan lain sebagainya. Buku-buku ini berisi tentang bagaimana cara pandang dan tanggapan FPI terhadap wacana lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu bagaimana FPI menyalurkan wacananya adalah dengan menampilkan penampilan yang “baik” menurut Islam. Dimana FPI dan anggotanya cenderung menggunakan jubah putih dengan sorban¹³ di kepala mereka yang diadopsi dari bagaimana cara nabi berpakaian (Woodward, et al., 2014). Ini untuk mencitrakan kebaikan dan kesucian umat Islam sehingga akan banyak orang yang tertarik untuk mengenal FPI dan kemudian bergabung dengan mereka.

Meskipun sering ditantang, dikafirkan, dan ditolak oleh kaum konservatis dan pengikutnya, gagasan global masih mencoba bertahan di Indonesia. Bahkan sebenarnya beberapa gagasan globalis tidak sejauh itu berbeda dengan

¹³ kain ikat kepala yang lebar (yang dipakai oleh orang Arab, haji, dan sebagainya).

landasan Islam yang dipercayai oleh kaum konservatis. Seperti pluralisme yang ingin menghilangkan paham primordialisme dan eksklusivisme yang sedikit banyak memicu masalah-masalah kemanusiaan. Nilai-nilai yang ada mengikuti pluralisme seperti kebebasan, keadilan, persamaan hak, dan lain sebagainya dijadikan inti/ pokok sistem sosial baru—*international society*. Nilai-nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam demokrasi dan HAM. Sesungguhnya gagasa-gagasan tersebut tidak bertentangan dengan nilai Islam. Karena di dalam Islam dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku (plural) untuk berinteraksi sosial. Bahkan pada masa kenabian dibuat Piagam Madinah yang dibuat antara muslim dan orang non-muslim—Yahudi. Dimana pada piagam ini memuat pasal-pasal, aturan, kesepakatan sosial antar mereka. Selain itu pada ajaran Islam juga diajarkan bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya bukan dari ras, etnis, kekayaan, jabatan, dan lainnya, melainkan tingkatan keimanan/ ketakwaan kepada Tuhan (Abdurrazaq, 2018).

Masalah ini juga diyakini oleh Hans Kung. Ia mengatakan bahwa etika-etika global dapat diterapkan sebagai kesepakatan dasar yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mengikat, standar yang tidak dapat diubah, dan sikap-sikap moral, yang dapat diterima oleh semua agama bahkan yang tidak beragama. Hans beranggapan bahwa sangat tidak mungkin jika tatanan pluralisme maupun etika global dipertimbangkan sebagai pengganti Taurat, Al-Quran, Bhagavadgita atau wacana Buddha. Menurutnya juga perdamaian antar bangsa tidak akan tercapai tanpa perdamaian antara agama, dan hal tersebut tidak bisa jika tanpa etika global (Küng, 1996).

B. Rezim Kebenaran Pelecehan Agama dalam Diskursus Konservatisme dan Diskriminasi sebagai Kejahatan Politik

Kasus perdebatan antara gagasan global dan konservatis di Indonesia tidak berbeda jauh dengan studi kasus praktik pengasingan orang gila dengan orang normal dari karya Foucault. Orang gila yang sering dikaitkan dengan kesulitan untuk berkomunikasi secara rasional hingga perilaku kekerasan. Pandangan ini menimbulkan perilaku dari masyarakat untuk “mengamankan” mereka yang gila. Hal ini menjadi pengetahuan dan kebenaran yang dibentuk oleh suatu sistem sosial. Ketika muncul pengetahuan lain mengenai pengetahuan tentang kegilaan dan tindakan yang harus diambil, dan pengetahuan ini tidak didukung oleh sistem yang disasar, pengetahuan ini tidak berlaku. Ini terbukti dengan masih ada beberapa tempat yang menerapkan pengasingan/ pengamanan kepada orang gila.

Hal yang sama terjadi pada kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok. Gagasan global yang dibawa oleh *international society* tidak mendapatkan dukungan dari sistem di Indonesia. Dengan kata lain mereka tidak mampu membangun relasi dengan sistem yang ada. Sedangkan dari pihak konservatis agama, mereka bukan hanya membangun relasi dengan satu pihak. Konservatis mampu membangun relasi baik dengan masyarakat, organisasi, hingga sistem pemerintah di Indonesia. Sehingga gagasan konservatis Islam menang atas globalis terlepas dari kebenaran atau salah dari tiap gagasan tersebut dalam memandang kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok.

Oleh Foucault kekuasaan selalu berkaitan dengan suatu kebenaran, dan kebenaran berhubungan dengan ilmu pengetahuan/ *knowledge*. Keinginan untuk menyatakan atau memberikan suatu kebenaran sama besar dengan

keinginan untuk berkuasa. Dari keterkaitan antara kekuasaan dan *knowledge* maka menurut Foucault, ilmu pengetahuan tidak akan pernah netral dan murni. Penjelasan ilmu selalu berusaha menguasai dengan mengeliminasi penjelasan ilmu yang lain untuk menentukan kebenaran menurut versinya dan menciptakan kekuasaan. Ini yang kemudian dimaksud dengan diskursus pengetahuan oleh Foucault. Diskursus adalah kejadian maupun benda yang berfungsi untuk menguasai kehidupan sosial dan budaya (Afandi, 2012).

Untuk menjelaskan pemikirannya tersebut Foucault tidak melepaskan kerangka psikoanalisis¹⁴. Dalam psikoanalisis dijelaskan bahwa manusia selalu berada dalam ketidaktahuan dan ketidaksadaran ketika berada dalam tekanan sistem konteksnya. Arti dari sistem konteks di sini adalah sistem sosial, sistem politik dan sistem budaya. Jadi individu sebenarnya tidak berfikir dan menciptakan suatu pengetahuan/ nilai murni namun yang terjadi adalah sebaliknya. Sistem tersebut yang berfikir dan membentuk suatu pengetahuan/ nilai melalui individu tersebut untuk membentuk kebenaran dan akhirnya menciptakan kekuasaan (Afandi, 2012).

Kasus pelecehan agama ini merupakan kasus yang satu garis dengan pendapat Foucault bahwa pada umumnya filsuf klasik mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Sedangkan para pemikir religius menghubungkan kekuasaan tersebut dengan Tuhan. Pemikiran filsuf klasik ini yang menjadi pokok gagasan global. Sedangkan konservatis agama Islam menghubungkan kekuasaan dunia berada di tangan

¹⁴ cara untuk mendapatkan secara terperinci pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber atau sebab gangguan jiwa dan represinya

Tuhan yang diterjemahkan melalui kitab-kitabNya. Kemudian keduanya sama-sama berlomba membangun relasi berbagai sistem di Indonesia. Namun tingkatan keberhasilan mereka membangun relasi dan membentuk kebenaran di Indonesia tidak sama dan ini dimenangkan oleh konservatis Islam.

Wacana konservatis mendapatkan keistimewaan di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk muslim tidak sulit bagi mereka untuk diamini kebenarannya. Konservatis Islam di Indonesia mampu memenangkan simpati masyarakat hingga pemerintah. Mereka tidak hanya mampu menguasai sistem sosial namun juga mampu mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan nilai Islam dalam sistem pemerintahan bahkan pada hukum yang berlaku. Kelompok-kelompok Islam di Indonesia juga banyak berkembang, dari yang mendapat julukan Islam moderat hingga radikal/ garis keras. Oleh karena itu ucapan Ahok membuat marah kaum konservatis Islam dan menuntut agar Ahok dihukum penjara. Dengan menggunakan masyarakat, konservatis mendesak pemerintah cepat tanggap dalam kasus ini.

Melihat hal tersebut berlangsung, kaum globalis mencoba untuk “ikut campur” dengan membawa gagasan bahwa Ahok merupakan korban kejahatan politik di Indonesia (Manurung, 2018). Mereka mengatakan bahwa Ahok sebenarnya hanya mengalami *double-discrimination* dimana ia merupakan umat Kristiani dan ditambah merupakan keturunan Tionghoa. Kasus Ahok ini dianggap sebagai pijakan untuk elit tertentu melengserkan Ahok dari jabatannya, dan menghalangi supaya tidak bisa melanjutkan kiprahnya di dalam pemerintahan Indonesia. Mereka juga berargumen bahwa Ahok hanya korban dari orang-orang yang tidak sesuai dengan model kepemimpinannya, pemberantasan korupsi yang sering

dilakukan. Pendukung wacana global mengatakan bahwa isu ini diangkat dan didukung oleh mereka yang korup dan takut dilepas jabatannya oleh Ahok. Kaum globalis juga menambahkan isu pelecehan agama yang dilakukan Ahok ini terjadi pada masa panas, untuk pergantian gubernur Jakarta. Oleh karenanya *international society* lebih gencar lagi mempertanyakan apakah pembelaan agama Islam ini murni untuk membela Islam ataukah merupakan satu cara untuk melengserkan Ahok. Selain itu kaum globalis juga mengatakan bahwa setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya, termasuk Ahok. Apa yang diucapkan Ahok merupakan bentuk pengekan dalam berpendapat, terlebih lagi isu ini muncul akibat dari rekayasa unggahan *video* oleh oknum tertentu (Manurung, 2018).

Bahkan beberapa pakar sosial dan politik mendukung argumen bahwa kasus ini merupakan salah satu pematik terkuat berjayanya kembali konservatisme di Indonesia, dan kembali menguatkan politik identitas di Indonesia. Penolakan pembelaan murni atas Islam, diungkapkan oleh Muhammad Asfar yang merupakan pengamat politik kepartaian dari Universitas Airlangga. Asfar mengemukakan bahwa kasus Ahok hanyalah reaksi sporadis terhadap model kepemimpinan Ahok dan bukan merupakan kebangkitan politik kanan (Siregar, 2017).

Selain itu Ward Berenschot seorang peneliti demokrasi dan identitas politik juga mengungkapkan bahwa ada aksi-reaksi negatif antara Islam (tengah kanan-konservatis) dan non-Islam (tengah kiri-globalis) yang merupakan buntut panjang dari isu terorisme dan isu politik yang diajukan Donald Trump, anti Islam dan anti imigran yang meningkat. Dari situ kemudian menimbulkan reaksi dari rakyat beberapa negara untuk “membela Islam dan melawan musuh-musuh Islam”. Sayangnya ini kemudian benar-benar dimanfaatkan oleh elit tertentu.

Sehingga ketika masalah muncul dan keadaan dirasa tidak aman maka politik identitas akan muncul. Politik identitas menjadi sangat menarik karena membantu memberikan rasa aman kepada mereka yang percaya terhadap identitas tertentu (Siregar, 2017).

Pemanfaatan kasus pelecehan agama oleh elite tertentu semakin kuat dengan pernyataan Asfar mengenai mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia. Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tidak banyak politikus yang menitikberatkan ideologi untuk dipilih melainkan pada kemampuan berpolitik. Sehingga mereka dipilih karena keterampilan dan memberikan ekspektasi yang baik. Selain itu ini juga didukung oleh peningkatan literasi masyarakat Indonesia sehingga memilih berdasarkan kalkulasi-kalkulasi rasional lebih dipilih (Siregar, 2017).

Survei juga dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan tim Litbang Kompas di 34 provinsi yang melibatkan 1.207 responden. Mereka melakukan survei untuk mengetahui potensi segregasi sosial berdasarkan ras dan etnis di Indonesia. Dari survei tersebut menghasilkan sebanyak 58,5 persen responden mengatakan bahwa masih mendengar pidato yang bernada diskriminatif. Selain itu 82,7 persen responden cenderung merasa lebih nyaman jika tinggal bersama dengan sesama rasnya. Bahkan berdasarkan survei tersebut, 83,1 persen responden memilih tinggal bersama dengan sesama sukunya (Tempo Staff, 2018). Bahkan isu diskriminasi ini juga diamini oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan selalu meningkat pada musim-musim pergantian pemimpin. Elsam mengatakan bahwa pada pemilu tahun 2019 diskriminasi berdasarkan etnis dan ras akan meningkat. Peningkatan diskriminasi ini tidak lepas karena politik identitas menguat di masa kampanye. Dibanding

isi-isu substantif atau programatis si calon pemimpin, isu mengenai simbolisme dan personifikasi orang jauh lebih penting. Menurut Elsam ini yang memicu penggunaan isu-isu keagamaan, suku, dan etnis pada model-model kampanye. Munculnya diskriminasi juga diperkuat dengan arus internet yang memudahkan orang untuk berkampanye sedangkan kampanye mereka menitikberatkan isu-isu simbolitas dan identitas. Ini mempermudah terbentuknya *hate speech* yang mengarah kepada ajakan untuk melakukan kekerasan verbal dan atau fisik kepada etnis dan kelompok agama tertentu (Wardah, 2018). Ini membuktikan kekonservatisan Indonesia yang kuat.

Penyelenggaraan Miss World 2013 di Indonesia juga mengalami penolakan dari kelompok konservatis Islam. Kontes kecantikan dunia tersebut pada awalnya akan diselenggarakan di Sentul Bogor, Jawa Barat. Bahkan setelah dipindahkan lokasinya aturan busana diperketat. Acara tersebut dilarang menggunakan bikini dan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tidak mempermasalahkan pemindahan lokasi diselenggarakannya Miss World begitu juga dengan pemerintah daerah Bali. Bahkan aturan pelarangan bikini yang diganti dengan kain adat Bali dianggap sangat baik karena menambah nilai jual Bali (BBC Staff, 2013). Pemindahan lokasi acara merupakan akibat dari penolakan dan ancaman dari kelompok konservatis agama. Salah satu perwakilan dari kelompok konservatis dalam demonstrasinya di Bundaran Hotel Indonesia, menyatakan bahwa kelompok dan pendukung siap berperang dan angkat senjata untuk membatalkan kontes tersebut jika benar di laksanakan di Bogor. CEO MNC Group Harry Tanoesoedibjo mencoba bernegosiasi agar Miss World tetap diadakan di Sentul. Namun akhirnya Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono yang pada saat itu berkuasa memutuskan untuk memindah lokasi acara (Keteng, 2013).

Selain itu banyaknya persekusi dan aksi-aksi kekerasan verbal dan fisik yang melibatkan kelompok konservatis dan kelompok lain juga menjadi bukti betapa Indonesia belum menerima demokrasi sesungguhnya. Bahkan salah satu ulama dari kelompok konservatis Islam, Misbahul Anam secara terang-terangan mengatakan bahwa menurut ia Indonesia bukanlah negara demokrasi melainkan negara musyawarah. Ia mengatakan bahwa demokrasi dan musyawarah berbeda. Selain itu dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk Islam, maka pemimpin harus beragama Islam (BBC Staff, 2017).

Masih tercatat kasus-kasus yang melibatkan kelompok konservatis Islam dalam melawan pandangan-pandangan yang tidak sesuai kepercayaan mereka. Bahkan persekusi tidak hanya disasarkan pada kelompok lain berbeda agama namun juga pada kelompok-kelompok berbasis Islam namun berbeda *mazhab*/ aliran. Pengamat dari Universitas Paramadina Budhy Munawar Rachman mengatakan bahwa FUI merupakan organisasi yang menggunakan kekerasan baik verbal dan fisik, melakukan ujaran kebencian hingga kekerasan fisik dalam melakukan aksi-aksi mereka. FUI dikenal dengan keantiannya kepada Ahmadiyah, Syiah, Gafatar. Mereka juga melaku aksi penolakan terhadap tempat ibadah lain yang tidak berizin (Aziz, 2017).

Presekusi terhadap kelompok Gafatar juga merupakan salah satu bukti betapa konservatisnya Indonesia, baik masyarakat hingga pemerintah. Gafatar mendapatkan kriminalisasi dengan pola fatwa sesat lalu penjara. Gerakan mereka juga dituduh menjurus pada upaya-upaya makar dan keinginan untuk merubah bentuk negara

Indonesia. Menurut pimpinan Ghafatar hal ini tidak benar karena berdasarkan aliran yang mereka percaya ada larangan untuk melawan penguasa. Selain itu pada kasus tuduhan penculikan salah satu dokter di Yogyakarta kepada Ghafatar yang mengakibatkan anggotanya dipenjara juga merupakan bukti ketidak netralan pemerintah dalam mengusut permasalahan keagamaan. Secara hukum dokter yang dianggap diculik tersebut sudah melampaui batas umur untuk bebas menentukan keyakinannya sendiri. Selain itu menurut para anggota, dokter tersebut secara sadar mengikuti Ghafatar (Kresna, 2017).

Persekusi tidak hanya terjadi pada Ghafatar, namun juga pada kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Syiah Sampang Madura. Persekusi yang terjadi pada kelompok-kelompok tersebut bukti kegagalan pemerintah sebagai negara hukum. Untuk melindungi kebebasan memeluk kepercayaan dan berorganisasi. Selain itu juga merupakan bukti ketidak sempurnaan dan efektifan peraturan mengenai pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Bahkan persekusi yang dilakukan kelompok terhadap kelompok lainnya menimbulkan masalah lain seperti kekerasan berbasis gender, psikis, seksual, hingga ekonomi. Ini dikarenakan mereka diusir dari tempat tinggal, dikucilkan, dan mendapatkan diskriminasi lainnya (Novianto, 2018).

Menurut koordinator lembaga non-pemerintah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani persekusi berbasis keagamaan terus terjadi akibat dari kasus Ahok. Penganiayaan pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah, penganiayaan hingga meninggal Ustad Prawoto petinggi Persatuan Islam (Persis) Bandung. Persekusi Biksu Mulyanto Nurhalim di Banten, yang dituduh menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Penyerangan di Gereja St. Lidwina di Yogyakarta

yang melukai Pastor Karl-Edmund Prier, anggota kepolisian, dan beberapa orang lain. Menurut KontraS, sepanjang tahun 2017 tercatat ada 75 peristiwa kekerasan berdimensi agama dan keyakinan. Empat daerah tercatat menjadi wilayah dominan terjadinya persekusi atas nama agama dan keyakinan, Jawa Barat dengan 17 peristiwa, Jawa Tengah 13, Jawa Timur 7, dan Banten 7 peristiwa (Amindoni, 2018).

Konservatis Islam bisa begitu kuat mempengaruhi tiap sektor kehidupan di Indonesia tidak luput dari dukungan banyak pihak. Diawali dengan pokok gagasan yang memang kuat. Ajaran agama Islam memang sudah ada bahkan jauh sebelum gagasan-gagasan global berkembang. Adanya kepercayaan kekuatan diluar batas rasional manusia menjadi ketakutan tersendiri bagi orang-orang yang meyakini. Dengan mayoritas penduduk yang menganut Islam mempermutah penetrasi ajaran-ajaran Islam. Karenanya sangat mudah bagi siapa saja untuk dipermasalahkan di sosial hingga hukum jika itu menyangkut agama Islam. Ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah terhadap konservatisme baik melalui hukum/ undang-undang maupun peraturan daerah.

Seperti hukum waris yang tertulis dalam UU Pasal 171-214 tentang Kompilasi Hukum Indonesia yang berisi seputar pewarisan harta menurut Islam. Selain itu ada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 1975 tentang Pelaksanaan dari UU No 1 tahun 1974, kemudian Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Wakaf, UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 32 1999 tentang Zakat, Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Haji, dan masih banyak hukum lainnya yang berdasarkan asas Islam.

Integrasi nilai-nilai Islam dengan landasan hukum di Indonesia sudah terjadi sejak lama, pada masa kemerdekaan. Oleh karena itu hukum Islam menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat dan menjadi bagian dari hukum nasional. Islam dan hukum nasional tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain (Yani, 2018). Oleh karena itu pada masalah pelecehan agama yang dilakukan Ahok sangat mudah bagi kelompok konservatis untuk memperkerakannya.

Tidak peduli bagaimana banyak pihak yang mengatakan bahwa Indonesia tidak dikuasai oleh konservatisme Islam nyatanya gagasan mereka mengakar kuat di Indonesia. Konservatisme Islam mampu menghalangi gagasan di luarnya untuk terlalu ikut campur dalam “mengatur” masyarakatnya. Dengan dinyatakan Ahok bersalah secara sah atas pelecehan agama yang dilakukannya dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan masa percobaan terhitung sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan 24 Januari 2019, menjadi bukti “kegagalan” gagasan global dalam membangun relasi dengan sistem di Indonesia.

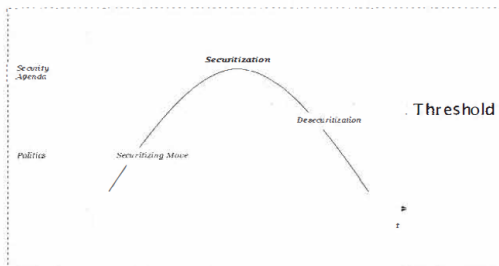
C. *Specch Act* dalam “Keberhasilan” Kelompok Konservatif di Indonesia

Ketika berbicara mengenai isu-isu di era kontemporer maka kekuasaan tidak melulu tentang masalah-masalah *high politics*. Seperti apa yang dijelaskan Mazhab Kopenhagen bahwa konsep kekuasaan mengalami perluasan dan pendalaman setelah Perang Dingin. Masalah lingkungan, kemanusiaan, diskriminasi, kebebasan, dan sebagainya menjadi masalah yang sering diperbincangkan setelah perang dunia mengakibatkan banyak kerusakan dan masalah baru di seluruh penjuru dunia. Masalah ini tidak hanya menjangkit negara-negara kalah perang

melainkan juga kepada mereka yang menang perang (Hadiwinata, 2017).

Meskipun begitu pada saat itu nyatanya masih banyak negara-negara yang beranggapan bahwa militer dan politik adalah sumber kekuatan nomor satu. Sampai pada dimana bermunculan aktor-aktor yang mampu menjadikan isu-isu non-tradisional ini penting dan mendesak agar segera mendapatkan penyelesaian masalahnya. Proses ini kemudian disebut sekuritisasi oleh para pakar Mazhab Kopenhagen, dimana didalamnya ada yang dinamakan *speech act* (Hadiwinata, 2017).

Gambar 3.1. Proses Sekuritisasi Mazhab Kopenhagen



Sumber: Studi dan Teori Hubungan Internasional, Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis

Jadi proses sekuritisasi adalah usaha meningkatkan urgensi suatu isu diluar isu keamanan, namun dengan suatu pernyataan atau *speech act* kepada masyarakat, audiens, atau publik melalui media, seminar, pidato, dan segala bentuk pertemuan lainnya sampai batas dimana “ancaman” tersebut sudah bukan lagi merupakan ancaman. Kemudian baru dilakukan desekuritisasi agar audiens tidak mengalami panik yang berlebih. Keberhasilan suatu sekuritisasi apabila empat syarat terpenuhi (Hadiwinata, 2017).

Empat syarat tersebut adalah kemampuan untuk meyakinkan masyarakat atau publik bahwa isu tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan bersama. Kemudian pernyataan tersebut tentu harus meyakinkan. Sasaran harus benar-benar yang mampu memahami pernyataan yang diberikan oleh si aktor/ pelaku sekuritisasi. Terakhir adalah kesinambungan antara pernyataan dan konteks atau isu yang akan disekuritisasikan. Ketika keempat syarat ini terpenuhi maka proses sekuritisasi isu akan berhasil (Hadiwinata, 2017).

Proses sekuritisasi sudah sering terjadi di berbagai negara seperti pada kasus penyebaran virus Ebola di Afrika yang membuat *United Nations* dan *World Health Organization* mendesak negara-negara lain untuk berhati-hati. Sehingga beberapa negara lebih memperketat izin keluar masuk kenegarannya jika mereka dari wilayah-wilayah yang terkena wabah Ebola. Selain itu kasus ketahanan pangan yang terjadi di zona riparian Sungai Mekong juga mengalami sekuritisasi. Kemudian di Indonesia proses sekuritisasi terjadi pada kasus penyebaran virus flu burung dan isu kemiskinan menjelang pemilu tahun 2014.

Sekuritisasi juga kembali terjadi di Indonesia pada kasus pelecehan agam yang dilakukan Ahok. Proses sekuritisasi dilakukan oleh kelompok konservatif Islam di Indonesia. Keberhasilan proses sekuritisasi oleh konservatis Islam karena kemampuan kelompok konservatis untuk melakukan empat syarat keberhasilan sekuritisasi sebagaimana yang tercantum dalam buku Bob Sugeng.

Kelompok-kelompok konservatis Islam mampu untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok benar-benar melecehkan Islam. Sehingga mereka meyakinkan atau mendorong masyarakat

untuk melakukan gelombang protes yang berakhir sebagai mendesak terhadap pemerintah untuk segera menghukum Ahok. Bahkan pemimpin-pemimpin kelompok konservatif tidak ragu untuk menyampaikan bahwa apabila Ahok tidak dihukum maka gelombang protes tidak akan pernah benar-benar berakhir, bahkan lebih dari itu mereka mengancam akan melakukan hal-hal yang lebih berani dibanding hanya sekedar aksi protes/demonstrasi. Dengan hal-hal tersebut, kelompok konservatis mampu membentuk opini masyarakat bahwa kasus ini benar-benar mendesak, sehingga bagi mereka baik yang pro maupun kontra tanpa sadar tergiring pada keinginan untuk proses hukum bagi Ahok segera selesai.

Kemudian pernyataan-pernyataan atau *speech act* yang dilakukan pimpinan-pimpinan konservatif lebih meyakinkan dibanding masyarakat internasional maupun aktor-aktor, pakar, sampai lembaga pemerintah di dunia. Hal ini tidak terlepas dari kesinambungan antara isu atau masalah yang diajukan dengan konteks isu itu sendiri. Maksudnya adalah antara aktor yang melakukan sekuritisasi, pernyataan isu yang disekuritisasi, dan konteks-konteksnya sesuai. Dalam kasus pelecehan Islam tersebut, perwakilan-perwakilan konservatis Islam melakukan *speech act* atau memberikan pernyataan berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai Islam. Mereka yang melakukan *speech act* menampilkan performa terbaik dengan menggunakan atribut-atribut Islam, dan hal-hal tersebut sesuai dengan anjuran Islam dan *sunnah* Nabi seperti penggunaan jubah, sorban, tasbih, dan sebagainya. Kemudian isunya sendiri merupakan masalah Islam, dan terjadi di negara dengan mayoritas Islam. Dengan terjadinya isu di negara yang mayoritas masyarakatnya Islam lengkap sudah empat syarat keberhasilan sekuritisasi. Dengan masyarakat yang memiliki dasar yang sama atau

pengetahuan yang sama, disini Islam, tidak sulit bagi konservatis Islam untuk menguasai masa.

Berbeda dengan masyarakat global, dimana mereka tidak melengkapi keempat syarat tersebut. Aktor-aktor dari global tidak benar benar meyakinkan dalam memberikan *speech act*. Bahkan salah satu ulama di Indonesia yang “membela” Ahok beritanya tidak semeriah mereka yang kontra. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesinambungan antara isu dan konteksnya. Sehingga pada akhirnya gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh global, dalam kasus ini tidak bisa mendesekritisasi apa yang dilakukan konservatif.

D. Benturan Gagasan Global dan Lokal Dalam Demokrasi Indonesia

Kajian dalam Studi Hubungan Internasional kontemporer memiliki fokus lebih luas dibanding masa tradisionalnya. Sampai berakhirnya Perang Dunia konflik negara merupakan permasalahan tentang ideologi, antara komunis, fasisme, liberal demokrasi. Konflik ini yang kemudian memunculkan klasifikasi negara-negara, Dunia Pertama, Kedua, dan Dunia Ketiga. Klasifikasi dunia tersebut kemudian dianggap tidak lagi relevan di era pasca-ideologi. Pada era ini, negara tidak lagi dikelompokkan melalui sistem politik maupun pertumbuhan ekonominya namun lebih kepada budaya dan *civilization* mereka. Menurut Huntington identitas *civilization* dunia akan dibentuk—sebagian besar—oleh tujuh hingga delapan peradaban besar. *The West*, Konfusianisme, Jepang, Islam, Hindu, Slavik-Ortodoks, Amerika Latin dan mungkin nantinya peradaban Afrika (Huntington, 1996).

Dengan begitu kajian hubungan antar bangsa pasca Perang Dunia juga tidak lagi melulu membicarakan masalah negara menguasai negara lain atau aktor menguasai aktor lainnya melalui kekuatan fisik. Dengan

berkembangnya isu-isu di dunia, kekuasaan yang nampak atau fisik seperti keamanan militer, antar wilayah, perkembangan infrastruktur dan ekonomi, bukan lagi cara pasti dalam “menguasai” aktor lainnya. Namun pada era post-ideologi ranah metafisik seperti budaya, *civilization*, diskursus wacana menjadi cara ampuh dalam menguasai aktor lainnya. Kajian pada hubungan internasional kemudian juga berkembang mengikuti perubahan zaman dan memunculkan pemikir-pemikir ranah *ideoscape*. Banyak pemikir dunia seperti Hans Kung dan Michel Foucault yang menyetujui bahwa ranah ide atau pikiran mampu menguasai manusia dan sistem yang ada.

Pergeseran masalah antar negara ini telah “diramalkan” oleh Samuel Huntington. Huntington mengatakan bahwa *clash of civilization* akan menjadi fase terbaru dalam evolusi konflik di dunia modern dan ini tidak akan dihindarkan. Argumen ini juga disetujui oleh R.R Palmer, di tahun 1793 ia mengatakan bahwa perang antara raja sudah berakhir dan konflik antar manusia sedang mulai (Huntington, 1996).

Civilization merupakan entitas budaya. Desa, wilayah, kelompok etnis, kebangsaan, sejarah, adat istiadat, lembaga, kelompok agama/ kepercayaan, semuanya memiliki budaya yang berbeda di berbagai tingkat heterogenitas budaya. Dengan demikian, *civilization* adalah pengelompokan *culture* yang paling tinggi dan tingkat identitas budaya yang paling luas dimiliki oleh seseorang untuk membedakan ia dari yang lainnya. Tiap individu bisa dan memang cenderung mendefinisikan ulang identitas mereka. Ini mengakibatkan komposisi dan batas-batas peradaban berubah yang kemudian memicu terjadinya *clash of civilization* (Huntington, 1996).

Terjadinya *clash of civilization* oleh Huntington dijelaskan secara rinci ada lima sebab. *Pertama*, perbedaan

antar peradaban tidak hanya nyata namun perbedaan ini sangat dasar-*basic*. *Civilization* yang merupakan pembedaan seseorang dari lainnya melalui sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan yang paling penting adalah agama/kepercayaan akan hampir selalu berbeda dalam memandang satu hal yang sama. Perbedaan ini merupakan hasil dari peradaban dan tidak akan hilang dalam waktu dekat. Mereka jauh lebih fundamental dari perbedaan ideologi dan rezim politik. *Kedua* karena dunia menjadi lebih kecil. Interaksi antara orang-orang dari berbagai peradaban meningkat; meningkatnya interaksi ini meningkatkan kesadaran peradaban dan kesadaran akan perbedaan antara peradaban dan kesamaan dalam peradaban. *Ketiga*, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia, memisahkan orang dari identitas lokal yang lama yaitu negara bangsa sebagai sumber identitas. Di sebagian besar wilayah dunia, identitas keagamaan mengisi celah yang terjadi di pemisahan identitas lama dan sering kali bentuk gerakan mereka dilabeli "fundamentalis." *Keempat* adalah pertumbuhan kesadaran-peradaban yang ditingkatkan oleh peran ganda dari Barat. Peran ganda yang dimaksud adalah ketika Barat sebenarnya ada di puncak kejayaan tapi mereka seperti kembali ke "awal" karena banyaknya kegagalan mereka untuk *spread the "culture"* buktinya adanya Asianation di Jepang, kegagalan demokratisasi di Timur, dan lain sebagainya. *Kelima*, karakteristik dan perbedaan budaya kurang bisa berubah dan karenanya kurang mudah dikompromikan dan diselesaikan daripada yang politik dan ekonomi. *Terakhir* adalah regionalisme ekonomi meningkat yang memicu identitas regional (Huntington, 1996).

Ketika seseorang mulai mendefinisikan identitas dalam istilah etnis dan agama, mereka cenderung melihat

hubungan dengan “kita” versus “mereka”. “Kita” merupakan orang-orang yang ada di antara mereka dan “mereka” merupakan orang-orang dari etnis atau agama yang berbeda. Perbedaan budaya dan agama menciptakan perbedaan atas isu-isu kebijakan, mulai dari hak asasi manusia, imigrasi, perdagangan, hingga lingkungan, dan isu lainnya (Huntington, 1996). *Clash of civilization* antara identitas “kita” dan “mereka” yang mencolok adalah konflik “the West” versus “Islam”. *Clash of civilization* antara dua identitas besar dikatakan kembali mulai menguat setelah kasus 9/11 atau penyerangan gedung kembar pusat ekonomi (*World Trade Center*) di Amerika. Munculnya kasus penyerangan ini menjadi pematik munculnya isu-isu identitas “kamu barat dan aku Islam, siapa yang kafir dan siapa yang Islam, siapa yang mau berkuasa dan siapa yang dijahati” yang intinya memperdebatkan identitas ajaran Islam melawan identitas sekuler milik Barat.

Masalah identitas ini terjadi di seluruh bagian dunia baik terutama di wilayah timur yaitu Asia tak terkecuali di Indonesia. Bentrok identitas yang terjadi di Indonesia yang paling mencolok adalah pada kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Ahok. Namun yang terjadi bukan identitas lokal yang resisten namun yang terjadi adalah *global norms* yang dianggap mengganggu ketenangan norma lokal di Indonesia yang kemudian mendapatkan perlawanan balik dari *local norms*. Kasus bentrok identitas ini menyeret dua identitas besar yaitu *global norms* dan *local norms*. *Global norms* membawa asas kebebasan berpendapat dari demokrasi untuk menyerang norma lokal. Sedangkan lokal membawa identitas Islam konservatif untuk melawan diskursus yang coba dibentuk oleh global. Pada kasus ini konservatis lokal tidak muncul sebagai akibat dari

globalisasi yang masuk, namun nilai-nilai global yang ikut campur dan mengganggu masalah interen lokal.

Posisi Ahok di sini terlalu kebarat-baratan baik dari cara dia memimpin sampai pada kasus pelecehan agama tersebut. Gaya kepemimpinan Ahok yang keras, blak-blakan, metode pendekatannya dengan pegawai dan masyarakat yang tajam, dan sebagainya dinilai kurang pas dengan budaya Indonesia terutama tanah Jawa. Sampai pada kejadian dimana Ahok menyinggung agama lain dalam pidatonya. Ia kurang memikirkan bahwa ia berada di negara dengan mayoritas Islam konservatif dan negara yang menerapkan hukum adat dengan sangat baik. apa yang dilakukan Ahok tidak akan jadi masalah jika ia tinggal di Barat yang sekuler. Karena “terlalu keBaratan” ini kemudian ia dipermasalahkan dengan segala macam cara. Mengapa dengan segala macam cara? Karena adanya gap waktu yang cukup jauh dari hari ia melecehkan sampai hari ia dilaporakan. Selain itu kasus ini menguap dikarenakan adanya rekayasa video pidato Ahok yang diunggah oleh oknum tertentu. Dengan latar belakang inilah Ahok menyedot kepedulian *international society* meskipun pada akhirnya mereka mengalami “kekalahan” dalam melawan idntitas lokal.

Identitas lokal mampu mempertahankan posisinya bahkan “menyerang balik” gangguan wacana global. Melalui *speech act* yang dilakukan baik pimpinan kelompok konservatis maupun pendukung mereka mampu mengumpulkan masa untuk bergabung mendukung penuntutan Ahok. Sedangkan para pendukung wacana global mengalami kekalahan jumlah dan jarak dengan dibanding pendukung konservatis. Selain itu melalui kelompok konservatis Islam pula kasus pelecehan agama ini disekuritisasi sehingga menjadi masalah mendesak yang harus segera diselesaikan dan jika tidak makan akan

mengganggu kesetabilan sosial di Indoensia. Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang turun langsung dalam demonstrasi penuntutan Ahok di Jakarta. Pemerintah tidak mungkin acuh pada “ancaman” ini sehingga mereka dengan segera menggelar sidang untuk Ahok, selain itu partai-partai politik juga tidak bisa menentang tuntutan masyarakat. Dengan menggunakan rezim kebenaran dalam meneliti kasus, penelitian ini membuktikan kegagalan norma global dalam membangun relasi dengan ruang sistem di Indonesia baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Mereka gagal membentuk wacana global di Indoensia karena adanya identitas konservatis lokal yang mampu melawan sehingga mempertahankan nilai yang telah ada. Namun selain itu penelitian ini juga secara tidak langsung juga membuktikan bahwa ternyata pemerintah Indonesia juga gagal dalam mengontrol asimilasi nilai global dan lokal. Dengan bentuk negara demokrasi, pemerintah Indonesia tidak bisa menjadi penengah yang tepat antara kedua gagasan. Tidak hanya karena menganut demokrasi Barat namun degan gelombang globalisasi yang kuat, pemerintah tidak bisa mencegah masuknya nilai global di seluruh sistem yang ada di Indonesia baik sosial, ekonomi, dan politik. Namun di sisi lain identitas konservatis Islam juga sudah sangat kuat berada dan mempengaruhi sistem-sistem di Indonesia juga dari masyarakat sampai dengan hukum yang berlaku.